

ABSTRACT

Geographical Indication is the aspect of IPR in the EU framework of policy, wherein its purpose is to signify agricultural products coming from certain areas in the EU. GI aims to establish the specialty of the regions which is motivated by the fact that it exports 25- 30% of its GI-protected products. This thesis aims to scrutinize the reason why EU proposes for GI inclusion in TTIP through identifying the politics of stakeholders inside the supranational organization. It also sets to explore the complexity of Intellectual Property Rights (IPR) framework, by highlighting EU's GI which approach of coverage is vastly different compared to US' trademark law (GI is not recognized in the US IPR laws, except the listed names of 6 EU wines from the 2006 Wine Agreement among the two). The importance of this thesis is to understand the politicization of IPR issue in trade negotiation, moreover, for its potential of monopolizing agricultural products in the market, which implies for protectionism.

Key words: Intellectual Property Rights (IPR), Geographical Indications, trade policy, agriculture, European Union

INTISARI

Indikasi Geografis adalah aspek HKI dalam kerangka kebijakan UE, di mana tujuannya adalah untuk menandakan produk pertanian yang berasal dari area tertentu di UE. GI bertujuan untuk membangun kekhasan daerah yang dimotivasi oleh fakta bahwa UE mengeksport 25-30% produk yang dilindungi GI. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk meneliti alasan mengapa UE mengusulkan inklusi GI dalam TTIP dengan mengidentifikasi politik para pemangku kepentingan di dalam organisasi supranasional. Skripsi ini juga akan mengeksplorasi kompleksitas kerangka Hak Kekayaan Intelektual (IPR), dengan menyoroti GI UE yang memiliki cakupan kebijakan sangat berbeda dibandingkan dengan undang-undang merek dagang AS (GI tidak diakui dalam undang-undang HKI AS, kecuali 6 nama minuman anggur milik UE yang telah disepakati dengan AS melalui 2006 Wine Agreement). Pentingnya skripsi ini adalah untuk memahami politisasi masalah HKI dalam negosiasi perdagangan, apalagi, untuk potensinya memonopoli produk pertanian di pasar, yang menyiratkan proteksionisme.

Kata kunci: hak kekayaan intelektual (HKI), indikasi geografi, kebijakan perdagangan, pertanian, Uni Eropa.